

**PENGELOLAAN DANA PNPM MANDIRI PEDESAAN DI  
KELURAHAN WARU KECAMATAN WARU  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
(Studi Tentang Program Dana Bergulir  
Simpan Pinjam Untuk  
Perempuan SPP)**

**Min Anwar Rasyid<sup>1</sup>**

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Pada Program Simpan Pinjam Untuk Perempuan di PNPM Mandiri Pedesaan Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis data model interaktif dari miles dan huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa UPK Kecamatan Waru sudah mengelola program ini dengan baik sesuai dengan SOP dan PTO yang berlaku pada PNPM Mandiri pedesaan tersebut, serta dalam pelaksanaan program simpan pinjam untuk perempuan setiap pengambilan keputusan selalu dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Untuk Pengelolaan Pinjaman Masalah sudah diupayakan secara optimal oleh Tim Penyehatan Pinjaman bersama UPK dengan melakukan musyawarah tingkat kecamatan serta dalam penanganannya dilakukan secara berbeda – beda sesuai dengan penyebab masalah pinjaman tersebut. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan dana bergulir yaitu banyak anggota kelompok simpan pinjam yang menunggak dalam pembayaran angsuran selain itu terdapat beberapa anggota kelompok simpan pinjam yang memberikan keterangan dan informasi palsu ke UPK.*

**Kata Kunci :** *Pengelolaan, Simpan Pinjam*

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka pada hakekatnya pemerintah

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rasyidclikers@yahoo.co.id

sudah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan orang per orang.

Namun dengan melihat realita saat ini dimana semakin tahun semakin tingginya biaya hidup, susahny mencari lapangan pekerjaan dan minimnya pendapatan membuat sebagian masyarakat semakin terbebani dalam memenuhi kebutuhannya sehari – hari sehingga selalu meningkatkan angka kemiskinan yang sudah ada. Kemiskinan merupakan masalah besar republik ini, karna semakin banyaknya masyarakat miskin maka tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tidak baik dan merupakan tugas berat bagi bangsa dan pemerintah saat ini untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan tersebut.

Berdasarkan pada landasan konstitusional UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka dibentuklah “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri Pedesaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program - program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandiriannya dalam pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Dan dalam program Pembangunan ini juga mengikut sertakan perempuan dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Salah satu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan kegiatan Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) yaitu pemberian modal untuk pengembangan usaha. Dengan kondisi semacam ini maka pemerintah melaksanakan program pembangunan diberbagai wilayah, dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat desa. Sasaran pembangunan terutama kepada mereka yang dikategorikan miskin.

Berdasarkan dari data Sistem Informasi Pelaporan Statistik (SIPS) Bapedda Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan sekitar 31,8% Rumah Tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong dalam Rumah Tangga miskin. Persoalan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara ini dapat dipicu oleh minimnya pendapatan mereka karna pekerjaan yang

belum memadai, dengan pendapatan yang jauh dari standar kebutuhan hidup layak maka membuat masyarakat dibawah garis keturunan tersebut susah keluar dari lingkaran kemiskinan. Dari data terakhir tahun 2012 yang peneliti dapat menunjukkan bahwa sebanyak 23,421 orang dari total jumlah masyarakat yang bekerja 64,398 Orang, atau sebesar 36,3% orang bekerja sebagai petani dan nelayan.

Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di kabupaten Penajam Paser Utara maka tidak hanya memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat namun perlu dilakukan konsep pemberdayaan masyarakat tepatnya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk di Kabupaten Penajam Paser Utara Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan sudah dilaksanakan sejak tahun 2007. Secara akumulatif, PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah mendanai sebanyak 5 kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang yang terdiri bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan kapasitas masyarakat, dan simpan pinjam.

Dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan, maka Kelurahan Waru mengambil alternatif, untuk memberdayakan perempuan dalam melaksanakan program PNPM Mandiri Pedesaan, untuk menunjang kegiatan tersebut kaum perempuan Kelurahan Waru ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan SPP (Simpan Pinjam Untuk Perempuan), guna meningkatkan kemampuan dalam permodalan untuk dapat melakukan usaha sendiri. Sehingga diharapkan dengan adanya tambahan modal begulir dapat meningkatkan penghasilannya tiap bulannya guna meringankan beban ekonomi keluarganya masing - masing. Yang pada akhirnya dapat menekan jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) di Kelurahan Waru khususnya.

Program Simpan Pinjam Untuk Perempuan merupakan program yang paling banyak diminati oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga, karna selain suku bunga lebih rendah dari pada bank pada umumnya proses peminjamannya juga tanpa adanya angunan atau jaminan sehingga memudahkan akses pendanaan atau permodalan bagi usaha skala mikro yang akan mereka lakukan, karena pada umumnya kebanyakan dari masyarakat ibu rumah tangga tersebut kesusahan dalam melakukan pinjaman dikarenakan adanya jaminan atau angunan sehingga banyak dari ibu rumah tangga yang tidak memiliki jaminan tidak dapat meminjam uang dibank atau koperasi yang sudah ada. .

Namun dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan tersebut khususnya di Kelurahan Waru Kecamatan Waru masih banyak sekali permasalahan yang kerap terjadi didalam Pengelolaan dana pada Program Simpan Pinjam Perempuan, berdasarkan dari keterangan salah satu pengurus UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Waru bernama

Ade Zuniam Palupi mengatakan bahwa permasalahan yang kerap terjadi yaitu banyaknya tunggakan setoran yang hampir dialami sebagian besar kelompok ibu rumah tangga yang meminjam uang di PNPM Mandiri Pedesaan tersebut hal ini membuat pelaksanaan program Simpan Pinjam Untuk Perempuan tidak dapat berjalan dengan baik. Dapat diketahui dari jumlah penunggak 14 Kelompok dengan total pinjaman beserta bunganya sebesar Rp. 578.200.000,- realisasi pengembalianya per 27 November 2013 mencapai 88,9% atau sebesar Rp. 514.040.400,-.

Dari data dan keterangan diatas diketahui banyaknya tunggakan setoran yang hampir dialami oleh sebagian kelompok simpan pinjam, sehingga dari situ penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah tulisan/skripsi yang berjudul : *“Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pedesaan di Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara”*.

## **Kerangka Dasar Teori**

### **Pengertian Kebijakan**

Menurut Edi Suharto (2007 : 3), “Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik”. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan – keputusan atau pilihan – pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, ideologi, dan kepentingan – kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.. Carl J Federick dalam Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan, “kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan - hambatan dan kesempatan - kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya di kerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat pemerintah atau lembaga berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

## **Pengelolaan**

Dalam Bahasa Inggris Pengelolaan = “Management” yang artinya : pengurus, tata pimpinan, pengendalian, pembinaan, penyelenggaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan pengemudian. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel dalam Siswanto (2005:2) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan. Menurut Koont dan O’Dannell dalam Tommy (2006:121) manajemen diartikan sebagai pelaksanaan sesuatu dengan menggunakan orang lain (getting things done through people). Dari batasan itu, menunjukkan bahwa sebagai fenomena sosial atau sebagai praktik, manajemen telah ada sejak seseorang menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian, istilah manajemen mengacu pada suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan – kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Proses menggambarkan fungsi – fungsi yang berjalan terus atau kegiatan – kegiatan utama yang dilakukan oleh para manajer. Fungsi – fungsi tersebut biasanya disebut sebagai merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan.

## **Fungsi Dan Proses Manajemen (Pengelolaan)**

Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Henry Fayol dalam Amirullah (2003:12) mengusulkan bahwa semua manajer paling tidak melaksanakan lima fungsi manajemen, yakni merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan.

## **Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)**

Berdasarkan Isi dari Pedoman Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam atau kegiatan usaha ekonomi. Sasaran Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan adalah rumah tangga miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Adapun bentuk kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan adalah memberikan

dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

### **Pengelolaan Dana Bergulir**

Dana bergulir berdasarkan buku petunjuk operasional PNPM Mandiri Pedesaan adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok – kelompok masyarakat.

Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM – Mandiri Perdesaan bertujuan:

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program;
3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan;
4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;
5. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

### **Mekanisme Pengelolaan**

Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan – tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana bergulir mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Akses dana bergulir mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses dana BLM hal ini di dasari oleh beberapa kondisi di antaranya :

1. Sifat kepemilikan dana oleh masyarakat
2. Model kompetisi antar kelompok peminjam bukan antar kegiatan.
3. Kelembagaan yang terlibat dengan mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dan UPK
4. Kebutuhan pola perguliran yang sesuai

Perbedaan karekteristik tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan tujuan, prinsip, ketentuan dasar program, sehingga dibutuhkan mekanisme yang sesuai yang didasari oleh :

1. Kelembagaan Pengelola

Kelembagaan pengelola dana bergulir yang harus ada paling tidak sebagai berikut :

- a. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
- b. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
- c. Tim Verifikasi (TV)

- d. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)
- e. Tim Penyehatan Pinjaman
2. Ketentuan pendanaan  
Ketentuan pengelolaan mengacu pada AD/ART, aturan perguliran dan SOP UPK yang telah disepakati.
3. Tahapan Pengelolaan Perguliran  
Tahapan pengelolaan perguliran mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir sesuai dengan SOP UPK dan buku petunjuk teknis operasinal PNPM Mandiri Pedesaan yang terdiri atas :
  - a. Usulan
  - b. Pembahasan dan Penetapan Usulan Permohonan Pinjaman
  - c. Pencairan dana
  - d. Pengembalian

### **Pengelolaan Pinjaman Bermasalah**

Pinjaman bermasalah disebabkan oleh berbagai sumber masalah dan memerlukan penanganan yang sesuai. Penyelesaian pinjaman bermasalah saat ini masih mengandalkan pada penagihan yang dirasakan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pada sisi lain penyelesaian pinjaman bermasalah disamaratakan pada semua pinjaman bermasalah tanpa dilakukan identifikasi, verifikasi maupun validasi penyebab permasalahan sehingga sering pola penyelesaian yang diterapkan tidak sesuai dengan penyebab permasalahan dan mengakibatkan tidak tuntasnya penyelesaian.

Tujuan pengelolaan pinjaman bermasalah adalah :

1. Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir agar tetap memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan permodalan usaha.
2. Memperkuat kelembagaan UPK dalam pengelolaan pinjaman yang mempunyai akuntabilitas sehingga diharapkan UPK menjadi lembaga pengelola pinjaman (microfinance institution) yang dipercaya oleh berbagai pihak.
3. UPK mempunyai pola pengelolaan pinjaman bermasalah yang sesuai dengan kesepakatan lokal, diketahui secara transparan oleh masyarakat, pola penyelesaian sesuai dengan permasalahan, dan memberikan rasa keadilan.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dana yang tertanam pada pinjaman bermasalah merupakan hak masyarakat seluruh kecamatan sehingga terjadinya pinjaman bermasalah merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip – prinsip pengelolaan pinjaman bermasalah :

1. Hak dan kewajiban masyarakat.  
Dana bergulir merupakan milik masyarakat sehingga seluruh masyarakat mempunyai hak untuk memanfaatkan sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk pelestarian pengembangan dana bergulir.
2. **Transparansi**  
Pengelolaan pinjaman bermasalah harus dikelola secara transparan dengan pelibatan masyarakat secara luas.
  3. **Kesesuaian**  
Pola penyelesaian pinjaman bermasalah harus sesuai dengan permasalahan yang mendasari serta sesuai dengan kemampuan masyarakat sampai dengan tingkat pemanfaat.
  4. **Kesepakatan**  
Penyelesaian pinjaman bermasalah yang dilakukan UPK harus dibuat dengan beberapa tahapan secara transparan.
  5. **Kesadaran Hukum**  
Meningkatnya kesadaran hukum melalui advokasi yang sesuai dengan hak masyarakat dan pembelajaran proses hukum dan ADR (Alternative Dispute Resolution).

### **Definisi Konsepsional**

Definisi Konsepsional adalah pembatasan istilah yang mengungkapkan suatu abstraksi yang dibentuk berdasarkan generalisasi yang merupakan hal atau kejadian yang diamati atau merupakan suatu pembatasan terhadap suatu masalah.

Berdasarkan beberapa teori dan konsep diatas, maka definisi konsepsional menurut peneliti mengenai Pengelolaan Dana PNPM pada Program Simpan Pinjam Untuk Perempuan adalah Proses pelaksanaan pendanaan pada kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam atau kegiatan usaha ekonomi dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Fokus Penelitian**

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan di dalam fokus. Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada :

1. Pengelolaan dana bergulir simpan pinjam untuk perempuan diPNPM Mandiri Pedesaan Kelurahan Waru Kecamatan Waru yang terdiri dari :
  - a. Kelembagaan Pengelola
  - b. Ketentuan Pendanaan
  - c. Tahapan Perguliran
2. Pengelolaan pinjaman yang bermasalah pada dana bergulir simpan pinjam untuk perempuan di PNPM Mandiri Pedesaan Kelurahan Waru Kecamatan Waru dengan tahapan sebagai berikut :



- a. Identifikasi dan Laporan
3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan di PNPM Mandiri Pedesaan Kelurahan Waru Kecamatan Waru.

### **Jenis dan sumber data**

Dalam penelitian ini, penunjukan informan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara Purposive Sampling. Menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal. Sebagai langkah awal penulis memilih dalam penelitian ini Key Informan adalah Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM Mandiri Pedesaan sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris, Bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM Mandiri Pedesaan, Anggota BKAD Kecamatan Waru, Fasilitator Kecamatan serta 4 Kelompok Simpan Pinjam Untuk Perempuan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan kata – kata yang biasa disusun dalam teks yang diperluas

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Kelembagaan Pengelola**

Dalam Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir tersebut sehingga didalam implementasi program tersebut dibutuhkan suatu kelembagaan yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan program tersebut.

Untuk dapat melaksanakan program Simpan Pinjam Untuk Perempuan Kelembagaan Pengelola Yang ada di PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Waru dibentuk berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan terdiri atas masyarakat sekitar.

Berdasarkan data dan hasil wawancara penulis dapat mendeskripsikan bahwa pengelolaan dana bergulir simpan pinjam untuk perempuan di PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Waru dilihat dari variabel kelembagaan pengelola diketahui bahwa kelembagaan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Untuk Perempuan tersebut terdiri atas BKAD, UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, dan Tim Penyehatan Pinjaman yang diwakili oleh orang – orang tertentu yang mempunyai pendidikan, kejujuran dan integritas yang tinggi sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat sinergi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya guna mencapai visi, misi serta tujuan yang telah disepakati. Dan untuk pembentukannya

dilakukan melalui forum musyawarah ditingkat kecamatan dan atas dasar usul, saran dan kesepakatan secara bersama – sama dengan masyarakat sekitar.

### **Ketentuan Pendanaan**

Ketentuan Pendanaan kegiatan Pengelolaan dana bergulir yang diberlakukan UPK Kecamatan Waru kepada kelompok peminjam yang peneliti dapat dari SOP UPK yaitu diantaranya :

1. Apabila kelompok simpan pinjam dapat melunasi pinjaman dengan baik tepat waktu tanpa tunggakan maka akan berhak untuk diberikan Reward/IPTW Insentif Pengembalian Tepat Waktu sebesar 5% dari jumlah total bunga yang dibayarkan ke UPK.
2. Bagi kelompok yang tidak lancar, maka akan terkena sanksi sebagai berikut :
  - a. Reward / IPTW akan hangus dan menjadi pendapatan lain – lain operasional UPK, atas dasar evaluasi selama 3 bulanan.
  - b. Apabila tunggakan angsurannya dalam kolektibilitas v atau macet maka kelompok bersangkutan tidak akan diprioritaskan dalam perguliran selanjutnya atau kelompok simpan pinjam tersebut dilarang untuk mengikuti perguliran lagi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam untuk perempuan dilihat dari variabel Ketentuan Pendanaan sudah dilakukan secara baik dengan berpatokan pada SOP yang berlaku saat ini, dimana ketentuan pendanaan merupakan serangkaian persyaratan yang wajib dilengkapi dan dilaksanakan oleh pemanfaat simpan pinjam serta pengelola program simpan pinjam untuk perempuan yang ada di UPK Kecamatan Waru, diantaranya yaitu setiap kelompok wajib mempunyai pengurus kelompok, anggota kelompok berjumlah sebanyak 5-20 orang, besaran bunga sebesar 1,5%/bulan atau 18%/tahun, dengan angsuran pembayaran dapat dilakukan setiap bulannya dengan total pinjaman 3 juta sampai dengan 10 juta rupiah tiap anggota kelompok.

### **Tahapan Perguliran**

Tahapan Perguliran adalah serangkaian kegiatan pengembangan dana yang telah kembali untuk digulirkan kembali kepada kelompok-kelompok masyarakat di desa yang telah mengembalikannya atau disesuaikan dengan mekanisme perguliran yang sudah ada dan berjalan baik sesuai dengan prinsip-prinsip PNPM. Pelestarian dana bergulir melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus tetap memperhatikan pada aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan yang berada di Kecamatan dan Desa. Dengan demikian maka pemanfaatan dana tersebut dapat memicu bergeraknya usaha ekonomi produktif masyarakat, mengembangkan potensi kegiatan kaum perempuan dan mendorong

peningkatan peran dan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melalui mekanisme manajemen pembangunan yang transparan dan partisipatif ditingkat kecamatan dan desa.

Pola perguliran yang dilakukan adalah pola perguliran ditingkat kecamatan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kesesuaian dengan cakupan wilayah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip PNPM Mandiri Pedesaan.

Adapun tahapan – tahapan perguliran dana simpan pinjam untuk perempuan yaitu meliputi :

### **1. Usulan Permohonan Pinjaman**

Usulan permohonan pinjaman merupakan suatu langkah awal bagi kelompok simpan pinjam untuk mendapatkan pinjaman bergulir, yang pada dasarnya usulan tersebut terdiri atas beberapa persyaratan untuk selanjutnya diproses dan diperiksa sesuai dengan Prosedur UPK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPK mewajibkan setiap calon peminjam untuk mengisi dan melengkapi berkas persyaratan proposal selanjutnya pihak UPK akan melakukan validasi dari setiap usulan proposal yang masuk untuk dapat dilakukan verifikasi atau peninjauan dilapangan untuk memastikan data dan informasi yang diberikan sesuai dan benar.

### **2. Pembahasan dan Penetapan Usulan Permohonan Pinjaman**

Agar proses perguliran dana SPP dapat dilakukan dengan tertib dan lancar maka pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah Pendanaan Perguliran (MPP) yang diselenggarakan oleh BKAD berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa atau melalui keputusan tim pendanaan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PNPM Mandiri Kecamatan Waru melakukan Musyawarah Pendanaan Perguliran (MPP) yang wajib dihadiri oleh setiap masyarakat calon pemanfaat dengan ketentuan untuk calon pemanfaat yang tidak dapat hadir akan dikurangi pengajuan pinjamannya sebesar 50%. Adapun musyawarah tersebut membahas penetapan kelompok – kelompok yang layak didanai serta besaran nominal jumlah uang yang akan dipinjamkan kepada kelompok simpan pinjam.

### **3. Pencairan**

Pencairan adalah kegiatan pemberian langsung uang secara tunai kepada kelompok – kelompok simpan pinjam yang sudah ditetapkan dan layak untuk diberikan pinjaman dan sudah melakukan verifikasi secara administratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perguliran yang meliputi pencairan dana bergulir dilakukan oleh UPK kepada calon pemanfaat atau kelompok simpan pinjam sesuai dengan prosedur dan ketentuan – ketentuan yang berlaku di PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Waru

serta dilaksanakan secara transparan dan melibatkan seluruh calon peminjam yang akan meminjam di UPK tersebut.

#### **4. Pengembalian**

Pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung oleh kelompok kepada UPK sesuai dengan jadwal dan jumlah angsuran yang telah disepakati atau ditetapkan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bahwa Pada program simpan pinjam untuk perempuan di Kelurahan Waru untuk pengembalian pinjaman kelompok dilakukan setiap bulannya pada tanggal 1 hingga tanggal 15 dengan ketentuan lewat dari batas waktu yang ditentukan akan diberlakukan sanksi berupa denda sebesar 2% dari total pokok pinjaman.

#### **Pengelolaan pinjaman yang bermasalah pada dana bergulir simpan pinjam untuk perempuan**

Mengingat Kelompok sebagai aset bagi UPK yang sangat penting, maka perlunya arah pendampingan kelompok, sehingga kelompok benar – benar menjadi media atau alat dalam memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat benar – benar bisa memperoleh manfaat dari keberadaan kelompok berupa kesejahteraan. Dikatakan kelompok sebagai aset bagi UPK karena apabila kelompok – kelompok yang menjadi mitra UPK memiliki organisasi yang sehat, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan UPK juga.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan pinjaman bermasalah dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang ada di PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan waru, dimana dilakukan secara bertahap yang berawal dari identifikasi penyebab masalah tunggakan kelompok dan dibuat laporan kolektibilitas seluruh kelompok untuk selanjutnya dapat digolongkan kelompok yang bermasalah pinjamannya.

#### **Identifikasi dan Laporan**

Untuk identifikasi dilakukan sesuai dengan data kondisi kelompok peminjam yang ada di UPK berdasarkan : Kartu Pinjaman/Kredit, Laporan perkembangan pinjaman dan Laporan kolektibilitas. Tujuan laporan kolektibilitas pinjaman adalah untuk mengetahui risiko pinjaman bukan berdasarkan risiko tunggakan tetapi risiko pinjaman basis kelompok, sehingga dapat dikatakan bahwa laporan kolektibilitas menunjukkan kualitas kelompok peminjam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Pinjaman Masalah pada Kelompok Simpan Pinjam Untuk Perempuan di Kelurahan Waru yang diidentifikasi berjumlah sebanyak 10 kelompok dilakukan secara berbeda – beda penanganannya, untuk kelompok simpan pinjam yang dikategorikan Microfinance atau disebabkan karna usahanya macet dan

tunggakan murni yaitu sebanyak 8 kelompok untuk dikelurahan waru, maka setiap masing – masing kelompok diberikan kesempatan untuk memperpanjang angsurannya selama 6 bulan lagi menjadi 18 bulan dari 12 bulan yang dijadwalkan. Untuk kelompok simpan pinjam yang bermasalah karna penyelewengan yaitu sebanyak 1 kelompok untuk dikelurahan Waru dilakukan penagihan tetap oleh UPK Kecamatan Waru, baik berupa dispensasi harta ataupun membayar tunai. Sedangkan untuk force majeure atau bencana alam yaitu sebanyak 1 kelompok untuk dikelurahan Waru dilakukan tindakan dengan melakukan musyawarah di tingkat kecamatan bersama pengurus BKAD dan UPK untuk mengambil keputusan berupa keringanan dalam pelunasan pembayaran. Pada dasarnya pihak UPK dan Tim Penyehatan Pinjaman sudah melakukan musyawarah tingkat kecamatan bersama BKAD,UPK,TPP,BP-UPK dan Fasilitator Kecamatan yang membahas tentang pengambilan tindakan untuk kelompok bermasalah. serta dalam penanganannya dilakukan secara berbeda – beda sesuai penyebab masalah pinjaman.

### **Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan**

Pengelolaan dana bergulir simpan pinjam untuk perempuan adalah upaya memberikan jaminan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, agar mampu memberikan perubahan positif bagi masyarakat, akan tetapi didalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat, seperti banyaknya kelompok yang menunggak dalam pembayaran angsuran, terdapat beberapa kelompok yang anggotanya belum aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh kelompok hingga kurangnya respon dan dukungan penuh pemerintah setempat terhadap pelaksanaan program tersebut.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa untuk faktor penghambat yaitu banyak anggota kelompok simpan pinjam untuk perempuan yang menunggak dalam membayar angsuran pinjaman ke UPK tiap bulannya, selain itu terdapat anggota kelompok simpan pinjam yang memberikan informasi dan keterangan palsu ke UPK serta terdapat beberapa anggota kelompok yang tidak ingin repot dalam pengurusan perguliran sehingga diserahkan dan ditanggung jawabkan ke pengurus kelompok. Sedangkan untuk faktor pendukung diantaranya yaitu meliputi anggaran dana yang cukup besar jumlahnya serta diimbangi dengan antusias masyarakat sekitar Kelurahan Waru yang cukup baik sehingga kelompok simpan pinjam selalu meningkat jumlahnya setiap tahunnya.

### **Penutup**

Dari hasil penelitian dan pembahasan Pengelolaan Dana bergulir Simpan Pinjam Untuk Perempuan pada PNPM Mandiri Pedesaan di Kelurahan

Waru Kecamatan Waru dapat di simpulkan bahwa program simpan pinjam untuk perempuan sudah dikelola atau dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional dan prosedur yang berlaku pada PNPM Mandiri pedesaan tersebut, serta dalam pelaksanaan program simpan pinjam untuk perempuan setiap pengambilan keputusan selalu dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Dan seluruh masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif. Sedangkan untuk ketentuan pendanaan sudah dilakukan sesuai prosedur dengan berpatokan pada SOP yang berlaku saat ini, diantaranya yaitu setiap kelompok wajib mempunyai pengurus kelompok, anggota kelompok berjumlah sebanyak 5 - 20 orang, besaran bunga sebesar 1,5%/bulan atau 18%/tahun, dengan angsuran pembayaran dapat dilakukan setiap bulan. Untuk Pengelolaan Pinjaman Masalah pada Kelompok Simpan Pinjam Untuk Perempuan di Kelurahan Waru sudah diupayakan secara optimal oleh UPK dan Tim Penyehatan Pinjaman dengan melakukan musyawarah tingkat kecamatan bersama BKAD,UPK,TPP,BP-UPK dan Fasilitator Kecamatan yang membahas tentang pengambilan tindakan untuk kelompok bermasalah. serta dalam penanganannya dilakukan secara berbeda – beda sesuai penyebab masalah pinjaman tersebut.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Untuk Perempuan yaitu banyak anggota kelompok simpan pinjam untuk perempuan menunggak dalam membayar angsuran bulanan ke UPK, selain itu terdapat beberapa kelompok yang memberikan informasi dan keterangan palsu ke UPK.

Sehingga agar dalam Pengelolaan Program Simpan Pinjam Untuk Perempuan nantinya dapat diberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi kelompok pengusul pinjaman yang memberikan informasi atau keterangan palsu, dan bagi UPK hendaknya dapat lebih meningkatkan pembinaan kepada kelompok simpan pinjam untuk perempuan setiap minggunya dengan melakukan pertemuan rutin perwakilan pengurus seluruh kelompok simpan pinjam setiap desa agar program ini dapat berkembang dan terus lestari.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul, Solichin, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, UMM Pres, Malang.
- Agustino, Leo.2006. *Dasar – Dasar Kebijakam Publik*, Alfabet, Bandung.
- Amirullah dan Budiyo, Haris. 2003. *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arinta Kustadi. 2000. *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga.2007.Balai Pustaka.Jakarta
- Moleon, J. Lexy. 2008.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mukhtar, 2007. *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Gaung Persada Press, Cipayang Ciputat.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Samodra Wibawa. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satori Djama'an dan Aan Komariah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Siswanto,2005. *Pengantar Manajemen*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Tommy Suprpto, 2006. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, MedPress, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori & Proses)*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
- Zainal, Said 2002. *Kebijakan Publik*, Pancur Siwah, Jakarta.

#### **Dokumen - Dokumen:**

- \_\_\_\_\_.2009. *Mekanisme Dan Prosedur Pengelolaan Dana dan Kegiatan Fasilitas Pendukung PNPM Mandiri*. Penerbit Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya,Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2007.*Panduan Teknis Integrasi PNPM Pedesaan*. Penerbit Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya,Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2007. *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*. Penerbit Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya.Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2009.*Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(Pengelolaan Dana Bergulir)*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia,Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2012. *Sistem Informasi Pelaporan Statistik (SIPS)*. Bapeda Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun.

#### **Internet :**

<http://www.pnpm-mandiri.or.id> (diakses pada tanggal 10 November 2013)